

**ANTESEDEN PENINGKATAN MOTIVASI DAN  
PARTISIPASI DALAM MENGEMBANGKAN POSDAYA  
DI PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**Sahnaz Ubud, Nurul Aisyah Rachmawati, Rizka Ramayanti, Ade Syahputra**  
Universitas Trilogi, Jakarta 12760, Indonesia  
*e-mail: sahnaz@universitas-trilogi.ac.id*

# KESEJAHTERAAN SOSIAL

Journal of Social Welfare

Vol. 1, No. 2, Mei 2014



ISSN : 2354-9874

# KESEJAHTERAAN SOSIAL

Journal of Social Welfare

## EDITORIAL

Pembatalan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi (Nomor 28/PUU-XI/2013) dinilai tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian nasional. Momentum baik ini sebaiknya diikuti dengan revitalisasi perangkat kebijakan perekonomian yang lain. Amanah menyejahterakan masyarakat melalui koperasi harus jadi prioritas dalam membangun perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dan gotong royong kembali menjadi semangat dalam membangun hubungan sesama dan berusaha. Berharap perekonomian cepat membaik dan menyejahterakan, hingga suatu saat kita sulit menemukan lagi orang yang perlu disantuni.

*Revocation of the Law Number 17 Year 2012 on Cooperatives by the Constitutional Court, that the law is considered not in accordance with the framework of the national economic. This court decision should be followed by the revitalization of other economic policies. The Mandate to make a prosperous society should be given a highest priority in the national economy policy. Togetherness and mutual cooperation will be the core value in raising relationship among others as well as in business matters. Hopefully the economy is going into the right direction by enhancing the welfare of all people until one day there is not a single member of the society that considered poor and need to be subsidized.*

Salam Sejahtera,  
Best wishes

**KETUA PENYUNTING (Chief Editor)**

## ALAMAT REDAKSI (EDITORIAL ADDRESS)

Jl. Kampus TRILOGI/STEXPI No. 1  
Kalibata, Jakarta Selatan 12760

(Ll. 3 Gedung Rektorat)

T. +62 21 7999011, pp. 384

Terbit 3 kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. Jurnal ini memuat artikel terkait dengan pengejawantahan UUD 1945 pasal 33 dan Ekonomi Pancasila dalam mencapai kesejahteraan sosial.

*Published 3 times a year in January, May, and September. The journal contains articles relating to the implementation of the Constitution 1945, in particular article 33 and Pancasila Economy, in order to accomplish the social welfare.*

## PENANGGUNG JAWAB (Person in Charge)

Asep Saefuddin (Rektor / Rector)

## DEWAN PENASIHAT (Advisory Board)

Haryono Suyono

Subiako Tjakrawerdaja

## KETUA PENYUNTING (Chief Editor)

Eko Kusmurtanto

## WAKIL KETUA PENYUNTING (Vice Editor)

Faizah Syihab

## PENYUNTING BAHASA INGGRIS (English Editor)

Aam Bastaman

Evelyn Djuardi

Ulfa Septiana

## PENYUNTING PELAKSANA (Executive Editor)

Budhi Purwandaya

Diah Lestariningsih

M. Karim

Novita

Sukmadi

## PELAKSANA TATA USAHA (Administrator)

Homa Harahap

Ratih Mahardika

Linda Noviani

## PENERBIT (Publisher)

UNIVERSITAS TRILOGI

## ANTESEDEN PENINGKATAN MOTIVASI DAN PARTISIPASI DALAM MENGEMBANGKAN POSDAYA DI PEMERINTAH KOTA BEKASI

Sahnaz Ubud, Nurul Aisyah Rachmawati, Rizka Ramayanti, Ade Syahputra

Universitas Trilogi, Jakarta 12760, Indonesia  
e-mail: sahnaz@universitas-trilogi.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan posdaya di Kota Bekasi dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan, komitmen, dan peran Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi anggota posdaya untuk mengembangkan posdaya. Data diambil menggunakan metode *sampleg* berstrata tiga tahap. Alat analisis menggunakan pendekatan *Generalized Structural Component Analysis*. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum posdaya di Kota Bekasi mengalami perkembangan dari tahun 2011 hingga 2013. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan dan peran Pemerintah Kota Bekasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi anggota posdaya. Motivasi anggota posdaya juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan posdaya dengan variabel partisipasi sebagai variabel *intervening*. Namun demikian, penelitian ini belum dapat membuktikan pengaruh komitmen Pemerintah Kota Bekasi terhadap motivasi anggota posdaya. Penelitian ini juga belum dapat membuktikan pengaruh peran Pemerintah Kota Bekasi dengan partisipasi dan motivasi terhadap perkembangan posdaya.

**Kata kunci:** Pemerintah Kota Bekasi, motivasi, partisipasi, perkembangan posdaya

## ANTECEDENTS OF MOTIVATION AND PARTICIPATION ENHANCEMENT IN DEVELOPING POSDAYA MUNICIPALITY GOVERNMENT IN BEKASI

### Abstract

The study was conducted to determine the progress of posdaya in Bekasi municipality from 2011 to 2013 as well as to determine the effect of the policy, the commitment, and the role of Bekasi government in increasing motivation and participation of posdaya's members to develop posdaya. The sample taken by using the sampling method and a three-stage stratified sampling method was used. This study also used structural model. This study found that in general posdaya in Bekasi experienced growth from 2011 to 2013. Moreover, this study also found that the policies and the role of the Bekasi government gave a significant effect on the motivation of members posdaya. Motivations of posdaya members also have a significant effect on the development of posdaya with variable participation as an intervening variable. However, this research has not been able to support the hypothesis on the effect of the Bekasi government's commitment to the motivation posdaya members. This research also has not been able to show the influence of the role of Bekasi municipal government with the participation and motivation for the development of posdaya.

**Keywords:** Bekasi municipality government, policy, posdaya's development

wirusaha, dan fungsi lingkungan. Kedelapan fungsi keluarga itu secara internasional dimantapkan sebagai delapan sasaran *Millennium Development Goals (MDGs)*. *MDGs* merupakan tekad dari kebijaksanaan pemerintah yang perlu didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun swasta. Hal ini disebabkan oleh masalah dan kebutuhan keluarga Indonesia semakin berkembang. Kompleksitas masalah yang dihadapi juga semakin tinggi. Padahal keluarga Indonesia belum berkembang dengan baik untuk mampu menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri (Suyono dan Haryanto, 2009).

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Untuk negara yang sedang berkembang, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama yang harus diraih dalam perkembangan negara tersebut (Sianipar dkk., 2013). Dengan demikian, pembentukan posdaya diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk meraih tujuan tersebut, posdaya juga dapat menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu dan berkelanjutan dalam berbagai bidang, utamanya agama, pendidikan, kesehatan, wirusaha dan lingkungan hidup. Melalui pembentukan posdaya, diharapkan keluarga bisa tumbuh mandiri di desanya.

Menurut Suyono dan Haryanto (2009), pengembangan posdaya ditujukan untuk mencapai hal-hal berikut: (1) Dihadirkan dukungan sosial budaya atau *social capital* seperti hidup gotong royong dalam masyarakat untuk merangsang keluarga lain membantu pemberdayaan secara terpadu atau bersama-sama memecahkan kehidupan yang kompleks, melalui wadah atau forum yang memberikan kesempatan para keluarga untuk saling asah, asih, dan asuh dalam memenuhi kebutuhan membangun keluarga bahagia dan sejahtera; (2) Terpeliharanya infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid, yaitu keluarga yang dapat menjadi perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun damai dan memiliki dinamika yang tinggi; (3) Terbentuknya lembaga sosial dengan keanggotaan dan partisipasi keluarga di desa atau kelurahan yang dinamis menjadi wadah atau wahana partisipasi sosial, sehingga para keluarga dapat memberi dan menerima pembantuan.

Sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam memberdayakan masyarakat (Sianipar dkk., 2012). Peranan institusi seperti

*non-governmental organization (NGO)* dan pemerintah juga sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat memunculkan keterkaitan antara strategi pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan institusi (Abdelhak dkk., 2012). Sianipar (2012) juga menekankan pentingnya peranan institusi (dalam hal ini perguruan tinggi), perusahaan (khususnya yang memiliki program *corporate social responsibility (CSR)*), untuk berperan secara bersama-sama dalam pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian Nkpoyen dan Bassey (2012) menunjukkan bahwa penciptaan kesempatan yang dimiliki berhubungan dengan pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan. *MDGs* secara umum dan kebijakan pemerintah yang pro rakyat miskin secara khusus dikaitkan dengan struktur pemerintahan dan interaksinya dengan masyarakat sosial. Tinjauan literatur yang dilakukan oleh Sung (2007) mengeksplorasi peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus memainkan peran yang lebih aktif dalam pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pemerintahan daerah yang memerlukan kontribusi dari partisipasi masyarakat daerah dengan praktik pemerintah lokal (Hug, 2012). Cornwall dan Brock (2005) meneliti tentang bagaimana pengurangan kemiskinan, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan digunakan dalam pengembangan kebijakan internasional. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa pengurangan kemiskinan, partisipasi, dan pemberdayaan memiliki arti penting dalam suatu kebijakan. Ternyata variabel-variabel tersebut juga berpengaruh dalam perkembangan posdaya. Prayitno (2008) mengeksplorasi bagaimana keterkaitan antara partisipasi masyarakat dalam mengembangkan posdaya dilihat dari pilar pendidikan, khususnya program wajib belajar 9 tahun. Tshabalala (2006) melakukan analisis mengenai peran partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Tshabalala (2006), partisipasi masyarakat memiliki dampak yang maksimal jika pemerintah daerah memiliki kesadaran dan kewajiban dalam menciptakan lingkungan. Eklund (1999) mengeksplorasi bagaimana meningkatkan kontrol atas kompetensi masyarakat melalui partisipasi aktif warga negara dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan ulasan di atas, penelitian ini ingin mengisi *gap* penelitian-penelitian sebelum-

nya. Penelitian ini ingin menguji pengaruh kebijakan, komitmen, dan peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi anggota posdaya untuk perkembangan posdaya. Pemilihan Kota Bekasi sebagai lokus penelitian ini disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, laju pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi cukup tinggi. Menurut Instat (2011), jumlah penduduk di Kota Bekasi tahun 2010 adalah sebesar 2,33 juta jiwa dengan laju pertumbuhan yang cukup besar, yaitu 3,5%, dibanding Jawa Barat yang sebesar 1,89% dan Indonesia sebesar 1,5%. *Kedua*, penduduk miskin di Kota Bekasi juga cukup besar, yaitu 5,8%, sementara di Indonesia secara umum sebesar 13,3%. *Ketiga*, pemberdayaan keluarga di Kota Bekasi memiliki peranan yang sangat penting. *Keempat*, Pemerintah Daerah Kota Bekasi turut mengambil peran dalam perkembangan posdaya di Kota Bekasi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Bekasi menerbitkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 400/Kep.172-Kapemas/V/2009 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pos Pemberdayaan Keluarga (posdaya) di Kota Bekasi Periode 2009-2013.

Dengan ditetapkannya perumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut: *pertama*, untuk mengetahui perkembangan posdaya di Kota Bekasi dari tahun 2011 sampai dengan 2013. *Kedua*, untuk mengetahui pengaruh kebijakan, komitmen, dan peran Pemerintah Kota Bekasi terhadap perkembangan posdaya melalui motivasi dan partisipasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan posdaya saat ini dengan adanya dukungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah selain Kota Bekasi untuk lebih meningkatkan peranannya dalam mengembangkan posdaya di daerahnya masing-masing.

## METODE

### Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh posdaya yang telah dibentuk dan sudah memiliki Surat Keputusan (SK). Populasi yang ada saat ini berjumlah 365 posdaya, yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan berbagai kriteria, yaitu posdaya unggulan/berkembang baik, posdaya yang perkembangannya biasa-

biasa saja, dan posdaya yang kurang berkembang. Di samping itu, posdaya dapat dikriteriakan menurut usaha dan keaktifan mereka dalam mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan CSR. Posdaya dengan kriteria ini umumnya tergolong sebagai posdaya yang ingin maju.

Sesuai dengan kondisi dan luasnya medan lapangan serta sebaran posdaya yang cukup berjauhan, maka digunakan *sampling* berstrata tiga tahap. Tahap pertama, dipilih kecamatan secara *random*, setelah terlebih dahulu mengelompokkan kecamatan ke dalam strata. Pengelompokkan kecamatan didasarkan pada kondisi posdaya sebagaimana tersaji dalam data basis Posdaya Kota Bekasi di akhir tahun 2011. Pada penelitian ini, kecamatan dikelompokkan menjadi 3 strata, yaitu: *Strata pertama*, kecamatan dengan persentase posdaya yang berkembang cukup baik lebih dari 50% dan menyatakan posdayanya mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah sebanyak lebih dari 60%; *Strata kedua*, kecamatan dengan persentase posdaya yang berkembang cukup baik lebih dari 50% dan menyatakan posdayanya mendapatkan dukungan dari penda sebanyak 60% dan kurang; *Strata ketiga*, kecamatan yang tidak memenuhi kriteria pada poin a dan b.

Dengan mempertimbangkan karakteristik posdaya di dalam strata yang kurang lebih homogen, maka pada setiap strata dipilih satu kecamatan secara *random*. Kecamatan terpilih adalah: Strata pertama, Kecamatan Bekasi Selatan; Strata kedua, Kecamatan Bantar Gebang; dan Strata ketiga, Kecamatan Rawa Lumbu.

Selanjutnya, pada tahap kedua dipilih 21 posdaya yang dialokasikan pada setiap strata dengan *proportional allocation*. Pada tahap ketiga, dari setiap posdaya dipilih 6 anggota posdaya dengan *judgement sampling*, yaitu ketua posdaya (1 responden), tokoh masyarakat seperti RW, RT, Ketua PKK (1 responden), dan ketua bidang posdaya (4 responden).

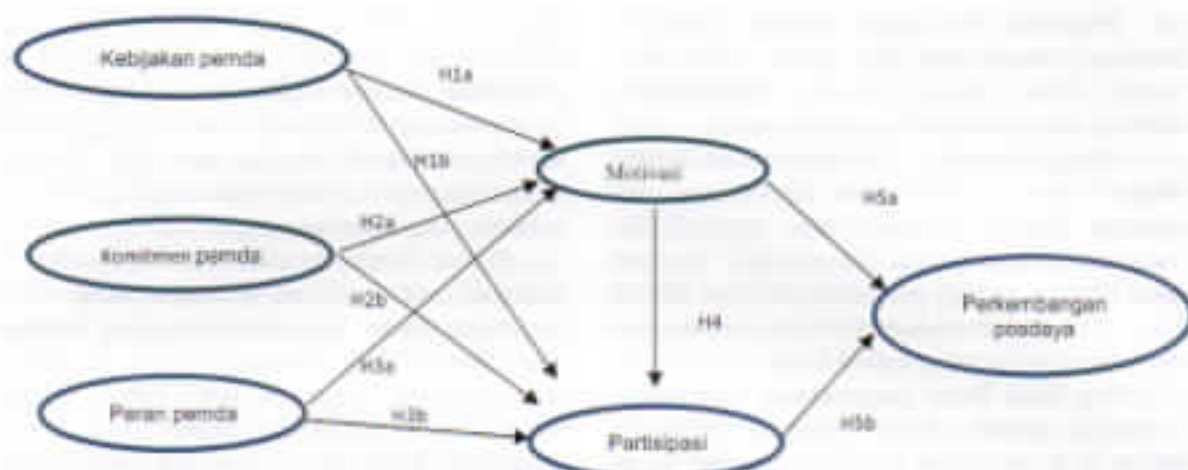
### Pengambilan Data

Data untuk penelitian ini diperoleh dari posdaya di Kota Bekasi yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: wawancara, dokumentasi dan kuesioner.

### Definisi Operasional Variabel Penelitian

*Kebijakan, Komitmen, Peran, Motivasi, Partisipasi, dan Perkembangan Posdaya*

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam



Gambar 1: Kerangka Konseptual Penelitian

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak secara tepat sasaran, efisien dan efektif, sehingga pedoman tersebut menjadi responsif dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berikut adalah indikator kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: tepat sasaran ( $X_{11}$ ); efisien ( $X_{12}$ ); efektif ( $X_{13}$ ); responsif ( $X_{14}$ ); adil ( $X_{15}$ ).

Komitmen adalah sikap kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi, serta kemauan untuk mengerahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas, sehingga kemajuan posdaya bisa terealisasi. Berikut adalah indikator komitmen pemerintah Daerah Kota Bekasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: ketersediaan fasilitas ( $X_{21}$ ); kemajuan posdaya ( $X_{22}$ ); turut serta dalam kegiatan ( $X_{23}$ ); menjaga perjanjian ( $X_{24}$ ); bekerja keras ( $X_{25}$ ).

Peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi pada umumnya berupa tenaga pendukung dari aparat untuk berkoordinasi, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kader posdaya, serta melakukan evaluasi untuk perkembangan posdaya. Dengan berdasarkan pada Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 400/Kep.172-Kapermas/V/2009, berikut adalah indikator peran Pemerintah daerah Kota Bekasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: koordinasi ( $X_{31}$ ); keaktifan ( $X_{32}$ ); pendampingan ( $X_{33}$ ); evaluasi kegiatan ( $X_{34}$ ).

Berdasarkan teori motivasi kontemporer, motivasi dapat diartikan sebagai alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Berikut adalah indikator motivasi anggota posdaya yang

digunakan di dalam penelitian ini adalah: kehidupan lebih baik ( $Y_{11}$ ); semakin puas ( $Y_{12}$ ); lebih bersemangat ( $Y_{13}$ ); lebih serius ( $Y_{14}$ ); sikap hidup lebih baik ( $Y_{15}$ ); harapan lebih baik ( $Y_{16}$ ); bekerja lebih keras ( $Y_{17}$ ).

Partisipasi adalah keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program posdaya berdasarkan 4 pilar posdaya. Berikut adalah indikator partisipasi anggota posdaya yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: hidup sehat ( $Y_{21}$ ); bersih lingkungan ( $Y_{22}$ ); program kesehatan ( $Y_{23}$ ); kesadaran akan pendidikan ( $Y_{24}$ ); kegiatan pendidikan ( $Y_{25}$ ); pentingnya berwirausaha ( $Y_{26}$ ); kegiatan kewirausahaan ( $Y_{27}$ ); program koperasi ( $Y_{28}$ ).

Perkembangan posdaya merupakan perkembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, lingkungan dan kegiatan gizi dari suatu posdaya dari sejak dikeluarkannya SK Posdaya sampai dengan sekarang. Berdasarkan Suyono dan Haryanto (2009), ada 5 indikator perkembangan posdaya yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: pendidikan ( $Y_{31}$ ); kesehatan ( $Y_{32}$ ); wirausaha ( $Y_{33}$ ); lingkungan ( $Y_{34}$ ); gizi ( $Y_{35}$ ).

Indikator-indikator di atas diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Rentang skala yang digunakan adalah angka 1 sampai 5. Angka 1 menunjukkan "sangat tidak setuju", angka 2 menunjukkan "tidak setuju", angka 3 menunjukkan "netral", angka 4 menunjukkan "setuju", angka 5 menunjukkan "sangat setuju".

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa bahwa responden terbanyak berjenis

kelamin perempuan, yaitu dengan presentase sebanyak 94%. Keterlibatan perempuan yang umumnya merupakan ibu-ibu rumah tangga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh posdaya merupakan bentuk pemberdayaan perempuan dalam posdaya. Dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga/perempuan secara sukarela berpartisipasi dalam posdaya dan ada beberapa yang merupakan anggota masyarakat yang terpilih karena kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Berdasarkan pendidikan terakhir, kebanyakan responden dalam penelitian posdaya ini berada pada klasifikasi pendidikan terakhir SLTA dengan presentase sebesar 45%. Sedangkan presentase terkecil adalah sebesar 1% berasal dari klasifikasi responden dengan pendidikan terakhir S2. Berdasarkan jabatan di posdaya, data berikut menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini dapat diklasifi-

kasikan ke dalam beberapa posisi jabatan yaitu: anggota posdaya (35%); pengurus bidang kesehatan (15%); ketua posdaya (14,2%); pengurus bidang pendidikan (11,7%); sekretaris (10,8%); pengurus bidang wirausaha (7,5%); pengurus bidang lingkungan hidup (5,8%).

### Uji Validitas dan Reabilitas

#### Uji *Convergent Validity*

Uji *Convergent Validity* dilakukan dengan cara melihat nilai faktor loading dan t statistik dari output *Generalized Structured Component Analysis (GSCA)*. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat validitas yang baik, apabila indikator tersebut memiliki nilai faktor loading di atas 0,50 dan nilai t statistic di atas 1,96. Dari output *GSCA* terlihat bahwa semua indikator dari variabel penelitian memenuhi kriteria tersebut (Table 1).

Tabel 1. Faktor Loading Indikator untuk Setiap Variabel Laten

Variabel laten	Indikator	Faktor loading	Standard error	T-statistik	Keterangan
Kebijakan	X <sub>11</sub>	0,787	0,040	19,675	Valid
	X <sub>12</sub>	0,857	0,032	26,781	Valid
	X <sub>13</sub>	0,896	0,017	52,706	Valid
	X <sub>14</sub>	0,815	0,028	29,107	Valid
	X <sub>15</sub>	0,766	0,040	19,150	Valid
Komitmen	X <sub>21</sub>	0,832	0,031	26,839	Valid
	X <sub>22</sub>	0,859	0,026	33,038	Valid
	X <sub>23</sub>	0,892	0,017	52,471	Valid
	X <sub>24</sub>	0,874	0,021	41,619	Valid
	X <sub>25</sub>	0,869	0,023	37,783	Valid
Peranan	X <sub>31</sub>	0,890	0,028	32,107	Valid
	X <sub>32</sub>	0,908	0,017	53,412	Valid
	X <sub>33</sub>	0,936	0,011	85,091	Valid
	X <sub>34</sub>	0,942	0,011	85,636	Valid
Motivasi	Y <sub>11</sub>	0,700	0,048	14,583	Valid
	Y <sub>12</sub>	0,736	0,040	18,400	Valid
	Y <sub>13</sub>	0,801	0,039	20,538	Valid
	Y <sub>14</sub>	0,820	0,027	30,370	Valid
	Y <sub>15</sub>	0,835	0,032	26,094	Valid
	Y <sub>16</sub>	0,859	0,029	29,621	Valid
	Y <sub>17</sub>	0,774	0,051	15,176	Valid
Peranan	Y <sub>21</sub>	0,739	0,034	21,735	Valid
	Y <sub>22</sub>	0,771	0,038	20,289	Valid
	Y <sub>23</sub>	0,548	0,091	6,022	Valid
	Y <sub>24</sub>	0,833	0,035	23,800	Valid
	Y <sub>25</sub>	0,833	0,035	23,800	Valid
	Y <sub>26</sub>	0,804	0,043	18,698	Valid
	Y <sub>27</sub>	0,783	0,045	17,400	Valid
	Y <sub>28</sub>	0,664	0,067	9,910	Valid

### Uji Discriminant Validity

Langkah selanjutnya adalah dengan melihat nilai *discriminant validity*. Nilai *discriminant validity* dikatakan memenuhi *rule of thumb*-nya jika nilai akar *AVE* lebih tinggi daripada nilai korelasi antar variabel laten. Berdasarkan Tabel 2, nilai *discriminant validity* masing-masing variabel laten baik terlihat dari nilai akar *AVE* lebih tinggi daripada nilai korelasi antar konstruk laten lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel laten dalam penelitian ini memenuhi *discriminant validity*.

Tabel 2. Akar *AVE* dan Korelasi Antar Konstruk Laten

	X1	X2	X3	Y1	Y2	Y3
Kebijakan (X1)	0,828					
Komitmen (X2)	0,045	0,885				
Peran (X3)	0,578	0,791	0,821			
Motivasi (Y1)	0,485	0,371	0,679	0,791		
Partisipasi (Y2)	0,488	0,408	0,477	0,517	0,782	
Perkembangan (Y3)	0,384	0,291	0,189	0,388	0,528	1,000

### Uji Composite Reliability (CR)

Untuk tahapan selanjutnya, peneliti juga melakukan pengujian reliabilitas. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel laten memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat *composite reliability (CR)* dan *average variance extracted (AVE)* yang merupakan hasil pengolahan *GSCA*. Selain itu penelitian ini juga melakukan pengujian reliabilitas dengan melihat *Cronbach's Alpha (Alpha)*.

Semua indikator dari suatu variabel laten dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila memiliki nilai *CR* di atas 0,70, nilai *AVE* di atas 0,50, dan nilai *Cronbach's*

*Alpha* di atas 0,70. Berikut ini adalah hasil tingkat reliabilitas untuk setiap variabel laten.

Berdasarkan tabel 3, semua variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Dengan kata lain, setiap indikator yang digunakan dapat mengukur variabel laten dengan baik.

Tabel 3. *CR*, *AVE*, dan *Alpha* untuk Setiap Variabel Laten

Variabel Laten	Composite Reliability	AVE	Akar AVE	Alpha	Keterangan
Kebijakan	0,814	0,682	0,826	0,883	Reliabel
Komitmen	0,927	0,744	0,863	0,911	Reliabel
Peran	0,977	0,849	0,921	0,948	Reliabel
Motivasi	0,923	0,628	0,791	0,897	Reliabel
Partisipasi	0,911	0,588	0,762	0,882	Reliabel

### Goodness of Fit Model Structural

#### *FIT*

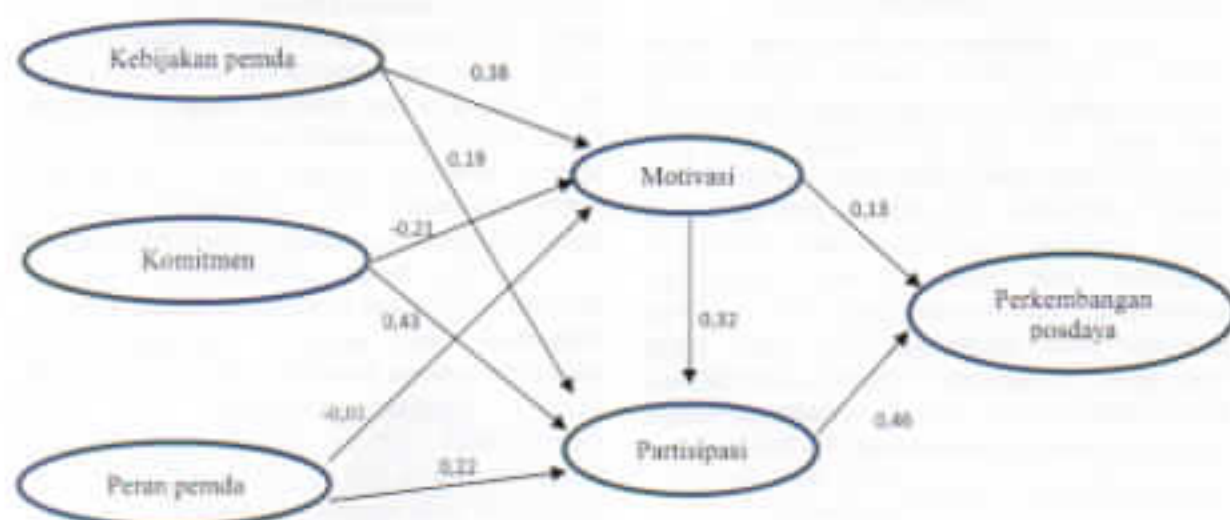
*FIT* menunjukkan varian total dari semua variabel yang dapat dijelaskan oleh model tertentu. Nilai *FIT* berkisar antara 0-1. Model yang terbentuk memiliki nilai *FIT* sebesar 0,660. Hal ini mengindikasikan bahwa keragaman kebijakan, komitmen, peran, motivasi, partisipasi dan perkembangan posdaya yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 66% dan sisanya (34%) dijelaskan oleh variabel yang lain. Berarti model cukup baik untuk menjelaskan fenomena yang dikaji.

#### *GFI* dan *SRMR*

*Unweighted least-squares (GFI)* dan *standardized root mean square residual (SRMR)* menunjukkan a *good level of overall model fit*. Keduanya sebanding dengan perbedaan antara sampel dan nilai *covariances* yang dipergunakan untuk mengestimasi parameter umum dari analisis komponen terstruktur. Jika nilai *GFI* mendekati 1 dan nilai *SRMR* mendekati 0, maka mengindikasikan model memiliki "good fit" (Hwang 2011). Dari output program *GSCA*, terlihat bahwa nilai *GFI* sebesar 0,883 dan nilai *SRMR* sebesar 0,316. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan nilai *GFI* mendekati 1 dan *SRMR* mendekati 0, secara keseluruhan model dapat dikatakan baik.

Penilaian dilakukan dengan melihat nilai koefisien parameter hubungan antar konstruk dan





Gambar 2: Evaluasi Model Struktur

nilai *t* statistik untuk menentukan apakah hubungan antar konstruk signifikan atau tidak. Tabel 4 menjelaskan bahwa kebijakan dan peran pemerintah daerah berpengaruh terhadap motivasi, kebijakan berpengaruh terhadap partisipasi, motivasi berpengaruh terhadap partisipasi dan partisipasi berpengaruh terhadap perkembangan posdaya (*t* statistik > 1,96). Komitmen tidak berpengaruh baik terhadap motivasi dan partisipasi, peran tidak berpengaruh terhadap partisipasi, dan motivasi tidak berpengaruh terhadap perkembangan posdaya secara langsung (*t*-statistik < 1,96).

### Pembahasan

Penelitian ini akan diperlihatkan perbandingan perkembangan posdaya pada tahun 2011 dan 2013. Secara keseluruhan jumlah posdaya di Kota Bekasi mengalami perkembangan, dimana

pada tahun 2011 terdapat 151 posdaya sedangkan pada 2013 meningkat menjadi 365 posdaya. Bila ditinjau dari kegiatan posdaya juga mengalami berbagai perkembangan yaitu bidang Pendidikan; Lingkungan dan Gizi; Kesehatan; serta Wirusaha.

### Kegiatan Bidang Pendidikan

Untuk jumlah siswa ketiga kecamatan mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai 2013. Adanya penurunan ini disebabkan oleh banyaknya PAUD baru yang bukan dari anggota posdaya, yang berkembang di sekitar posdaya. Tetapi jika dilihat dari kader jumlah guru/pengasuh PAUD di 3 kecamatan, justru mengalami peningkatan selama 2 tahun. Kenaikan ini dipicu oleh semakin meningkatnya pelatihan yang diberikan untuk menjadi guru/pengasuh PAUD.

Tabel 4. Hubungan Antar Variabel

Jalur	Loading	Loading (SE)	t statistik	Keterangan
Kebijakan – motivasi	0,270	0,141	2,688	signifikan
Komitmen – motivasi	-0,210	0,149	1,009	tidak signifikan
Peran – motivasi	0,425	0,133	3,195	signifikan
Kebijakan – partisipasi	0,191	0,094	2,032	signifikan
Komitmen – partisipasi	-0,006	0,175	0,034	tidak signifikan
Peran – partisipasi	0,218	0,189	1,153	tidak signifikan
Motivasi – partisipasi	0,321	0,100	3,210	signifikan
Motivasi – perkembangan	0,131	0,125	1,048	tidak signifikan
Partisipasi – perkembangan	0,457	0,085	5,376	signifikan

### *Kegiatan Bidang Lingkungan dan Gizi*

Setelah dilakukan penelitian pada 3 kecamatan yang dijadikan sampel, dapat dilihat bahwa perkembangan bidang lingkungan dan gizi dari tahun 2011 dan 2013 untuk kebun gizi, tanaman obat, dan pembuatan pupuk secara umum mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan tanaman obat mengalami peningkatan. Namun demikian, pada beberapa posdaya pilar lingkungan dan gizi justru mengalami penurunan, dikarenakan adanya keterbatasan lahan akibat beralihnya fungsi kebun gizi menjadi pemukiman.

### *Kegiatan Bidang Kesehatan*

Jumlah siswa dan pos kesehatan ketiga kecamatan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2013. Peningkatan ini dipicu oleh semakin banyaknya jumlah kelahiran bayi dan lansia di daerah posdaya tersebut, yang menyebabkan perlu ditambahnya jumlah posyandu untuk mengakomodir balita dan lansia yang ada.

### *Kegiatan Bidang Wirausaha*

Secara umum bidang wirausaha ketiga kecamatan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2013. Peningkatan ini terjadi karena beberapa posdaya ada yang mendapatkan bantuan baik berupa modal maupun pelatihan dari pihak swasta, misalnya program CSR dari Indofood yang diterima oleh Posdaya Delima VII. Selain itu, meningkatnya jumlah anggota koperasi/simpan pinjam juga mampu meningkatkan jumlah kelompok usaha.

Untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua, penelitian ini menguji pengaruh kebijakan, komitmen, dan peran Pemerintah Kota Bekasi terhadap perkembangan posdaya melalui motivasi dan partisipasi. Dari tabel 4 hasil pengolahan data terlihat bahwa kebijakan dan peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi, sedangkan komitmen ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi anggota posdaya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi sampai dengan saat ini mampu meningkatkan motivasi anggota posdaya. Dengan demikian, kebijakan dan peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa anggota posdaya benar-benar merasa termotivasi untuk mengembangkan posdaya dengan adanya kebijakan dan peran

pemerintah daerah. Dianutnya kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam upaya pengembangan posdaya sebagaimana tercantum dalam SK Walikota Bekasi, mungkin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan motivasi anggota posdaya. Dengan adanya SK tersebut pemerintah daerah harus menjalankan peran dan kebijakan tersebut, sehingga wajar jika anggota posdaya benar-benar merasakan dampak dari kebijakan dan peran pemerintah daerah tersebut. Sementara itu, anggota posdaya kurang merasakan adanya komitmen pemerintah daerah. Dengan demikian, komitmen tidak dapat meningkatkan motivasi mereka dalam mengembangkan posdaya. Hal ini pun sesuai dengan hasil wawancara pada beberapa responden.

Kebijakan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi, sedangkan komitmen dan peran tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anggota posdaya. Peran tidak secara langsung berpengaruh ke partisipasi. Dari hasil penelitian, peran akan berpengaruh terhadap partisipasi melalui motivasi dalam mengembangkan posdaya.

Motivasi berpengaruh terhadap partisipasi. Partisipasi berpengaruh terhadap perkembangan posdaya. Hasil ini mengindikasikan bahwa posdaya akan berkembang jika anggota posdaya berpartisipasi aktif terhadap perkembangan posdaya. Motivasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan posdaya, akan tetapi diperlukan partisipasi anggota posdaya secara langsung dan nyata. Dengan kata lain, perkembangan posdaya tidak akan terwujud apabila anggota posdaya hanya memiliki motivasi saja, tanpa disertai partisipasi aktif untuk mengembangkan posdaya.

## **Implikasi**

### *Implikasi teoritis*

Penelitian ini memperkuat teori *Social and Human Capital*, di mana dalam teori tersebut modal sosial sangat penting untuk proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga modal sosial dapat mempercepat proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini juga memperkuat penelitian Cornwall dan Brock (2005), Tshabalala (2006), Stanipar (2012), Abdelhak *dkk.* (2012), dan Hug (2012).

### *Implikasi Praktis*

Kebijakan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi anggota posdaya dalam mengembangkan posdaya. Kebi-

jakan pemerintah daerah haruslah tepat sasaran, efisien, efektif, responsif, dan dirasakan adil bagi semua anggota posdaya. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam perkembangan posdaya. Diperlukan koordinasi peran aktif, pendampingan dan evaluasi dari pemda untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi anggota posdaya. Dengan demikian, perkembangan posdaya pun dapat mengalami peningkatan.

## Kontribusi

### Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis penelitian ini, yaitu pada pengembangan wawasan konseptual mengenai *community development* (pemberdayaan masyarakat) yang didasarkan pada teori *Social and Human Capital*. Temuan empiris penelitian ini menyarankan bahwa kebijakan dan peranan pemerintah daerah mampu meningkatkan motivasi anggota posdaya. Peningkatan motivasi anggota posdaya akan memengaruhi partisipasi anggota posdaya. Melalui partisipasi aktif dari anggota posdaya inilah posdaya di Kota Bekasi mengalami perkembangan.

### Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah diharapkan hasil-hasil yang ada dalam penelitian ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan keinginan pemerintah daerah, khususnya di Kota Bekasi dan secara umum di Indonesia, dalam upaya mengembangkan posdaya. Pasalnya, di dalam perkembangan posdaya diperlukan adanya kebijakan dan peranan pemerintah daerah untuk memotivasi dan meningkatkan partisipasi anggota posdaya. Dengan demikian, diharapkan MDGs dapat terealisasi dengan baik, khususnya di Kota Bekasi dan secara umum di Indonesia.

## SIMPULAN

*Pertama*, perkembangan posdaya di lihat dari 4 pilar yaitu pendidikan, lingkungan dan gizi, kesehatan, kewirausahaan bervariasi. Pilar pendidikan mengalami penurunan dilihat dari jumlah siswa PAUD akan tetapi mengalami peningkatan dalam jumlah guru PAUD. Pada pilar lingkungan dan gizi mengalami secara umum mengalami peningkatan. Namun pada beberapa posdaya justru mengalami penurunan, dikarenakan adanya keterbatasan lahan akibat beralihnya fungsi kebun gizi menjadi pemukiman. Pilar kesehatan, pada posyandu mengalami peningkatan, dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup

sehat. Pilar wirausaha, mengalami peningkatan, misal pada Posdaya Delima VII di bantar gebang yang mengalami peningkatan dalam berwirausaha karena adanya CSR dari Indofood.

*Kedua*, ditinjau dari kebijakan dan peran pemerintah daerah ternyata berpengaruh dalam meningkatkan motivasi bagi anggota posdaya. Peningkatan motivasi anggota posdaya ternyata juga mampu meningkatkan partisipasi anggota posdaya, sehingga perkembangan posdaya di Kota Bekasi dapat berkembang dengan baik dikarenakan adanya motivasi dan partisipasi dari anggota posdaya, di samping kebijakan dan peranan dari pemerintah daerah juga memberikan pengaruh bagi perkembangan posdaya melalui motivasi dan partisipasi anggota posdaya. Namun penelitian ini belum dapat menemukan asosiasi yang signifikan antara komitmen dan peran dengan motivasi dan partisipasi.

## Saran

### Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi

*Pertama*, dalam melaksanakan program posdaya, pemerintah daerah agar tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang telah berlangsung selama ini secara efektif dan efisien, selalu tepat sasaran dalam implementasi kebijakan tersebut serta diharapkan tetap bersikap adil terhadap seluruh anggota posdaya. *Kedua*, peranan pemerintah daerah lebih ditingkatkan bagi kesejahteraan anggota posdaya, sehingga target MDGs dapat tercapai, setidaknya pengentasan orang miskin, mengingat tingkat kemiskinan di Kota Bekasi masih cukup tinggi. *Ketiga*, kebijakan dan peranan pemerintah daerah harus tetap bisa memotivasi dan meningkatkan partisipasi anggota posdaya, untuk perkembangan posdaya.

### Bagi Penelitian Selanjutnya

*Pertama*, berdasarkan responden yang ada ternyata sebagian besar adalah perempuan, penelitian selanjutnya dapat lebih menekankan pada pengaruh *gender* dalam pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, dalam membentuk dan mengembangkan posdaya, potensi timbulnya konflik juga cukup besar, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menekankan pada *conflict resolution* anggota posdaya. *Ketiga*, dalam mengembangkan posdaya dibutuhkan adanya kepercayaan dalam mengelola posdaya menjadi lebih baik. Juga, perlunya penambahan variabel kepercayaan pada model penelitian selanjutnya.

## PENGHARGAAN

Terima kasih kami sampaikan kepada Hanifah, Inggar Pandu Sarjaya, Ilyas Shibghatallah Mujahidi, dan Ridbo Ilham Pribadi selaku asisten peneliti yang sekarang sedang menempuh jenjang S1 di Universitas Trilogi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhak S, Sulaiman J, Saidatulakmal M. 2012. Poverty Among Rural Communities in Kelantan And Terengganu, The Role of Institutions, Farmer's Risk Management & Coping Strategies. *Journal of Applied Sciences* 12 (2): 125 – 135.
- Cornwall A, Brock K. 2005. Poverty Reduction, Participaation and Empowerment in Development Policy. United Nations Research Institute For Social Development.
- Eklund L. 1999. From Citizen Participation Towards Community Empowerment [Dissertation].
- Hug PA. 2012. Participation Empowerment and Community – Driven Development [Dissertation].
- Hwang H. 2011. GSCA User's Manual.
- INSTAT. 2011. Profil Posdaya Kota Bekasi. Jakarta.
- Nkpoyen F, Bassey GE. 2012. Micro-Lending as an Empowerment Strategy For Poverty Alleviation among women in Yala local Government Area of Cross River State. *International Journal of Business & Social Science* 13 (18).
- Prayitno D. 2008. Partisipasi Masyarakat dalam implementasi kebijakan Pemerintah [Tesis].
- Sianipar CPM, Widarotna K. 2012. NGO as Triple Axia: Some Lessons From Nias Community Empowerment On Cocoa Production. *Journal Of Social And Behavioral Sciences* 52 : 197 – 206.
- Sianipar CPM, Yudoko G, Adhutama A. 2013. Community Empowerment Through Appropriate Technology: Sustaining The Sustainable Development. *Journal Of Environmental Sciences* 17: 1007 – 1016.
- Socharjono AMD. 2013. Peran Pemerintah Daerah dalam upaya menyukseskan tujuan pembangunan millenium (*Millentium Development Goals*).
- Sung. 2007. A Study for The Role & Responsibility Of The Government in The Community Empowerment. *Proceedings of The 6th Conference of The Pacific Rim Community Design Network*.
- Suyono H, Haryanto R. 2009. Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Keluarga (Posdaya). Jakarta: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.
- Tshabalala EK. 2006. The Role Of Community Participation In the Integrated Development Plan Of Govan Mbeki Municipality [Thesis].